

**PEMAKNAAN *STAKEHOLDERS* ATAS *INTERNATIONAL CLASS*  
*PROGRAM***  
**(Studi di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Peryaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Magister Sosiologi**



**Disusun oleh :  
DEWI SETIAWATI  
NIM: 201610270211008**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Juli 2018**

**PEMAKNAAN *STAKEHOLDERS* ATAS *INTERNATIONAL CLASS*  
*PROGRAM***

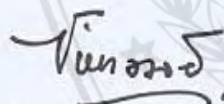
**(Studi di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang)**

**DEWI SETIAWATI  
201610270211008**

Telah disetujui

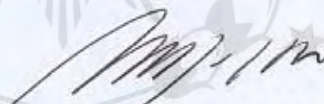
Pada hari/tanggal, Kamis/ 26 Juli 2018

Pembimbing Utama



Dr. Vina Salviana, D.S., M.Si.

Pembimbing Pendamping



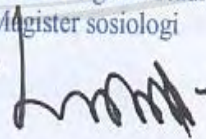
Dr. Asep Nurjaman, M.Si.

Direktur  
Program Pascasarjana



Abdusalam, Ph.D

Ketua Program Studi  
Magister sosiologi



Prof. Dr. Ishommuddin, M.Si.

# TESIS

**DEWI SETIAWATI**  
**201610270211008**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Kamis/ **26 Juli 2018**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Dr. Vina Salviana D.S, M.Si.  
Sekretaris / Penguji : Dr. Asep Nurjaman, M.Si.  
Penguji : Prof. Dr. Ishommuddin, M.Si.  
Penguji : Dr. Masduki, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **DEWI SETIAWATI**

NIM : **201610270211008**

Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PEMAKNAAN STAKEHOLDERS ATAS INTERNATIONAL CLASS PROGRAM (Studi di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juli 2018

Yang menyatakan,

  
  
**DEWI SETIAWATI**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pemaknaan *Stakeholders* atas *International Class Program* (Studi di SMA Laboratorium UM)**. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Sosiologi yang penulis tempuh

Terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Rinikso Kartono, M.Si. selaku Dekan FISIP (Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof. Dr. Ishommuddin, M.Si. selaku Kaprodi Doktor FISIP (Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) dan Kaprodi Magister sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, serta selaku dosen penguji utama yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr.Vina Salviana D.S, M. Si. selaku dosen pembimbing utama yang dengan bijaksana dan sabar telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini
4. Bapak Dr. Asep Nurjaman, M.Si. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah dengan sabar memberikan arahan dan motivasi yang besar kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini
5. Bpk Dr. Masduki, M.Si selaku dosen penguji II dalam ujian tesis saya, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen program Magister Sosiologi yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan yang luas selama proses menempuh magister sosiologi
7. Kepala SMA Laboratorium dan guru-guru SMA Laboratorium UM yang telah memberikan dukungan untuk terselesaikannya tesis ini.
8. Seluruh rekan-rekan civitas akademika jurusan Magister Sosiologi angkatan 2016.
9. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik, *stakeholders* terkait penyelenggara ICP maupun pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini. Dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Malang, Juli 2018

Penulis



## ABSTRAK

Setiawati, Dewi. 2018. **Pemaknaan *Stakeholders* Atas *International Class Program* (Studi Di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang).** Tesis, Program Studi Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen pembimbing (1) Dr. Vina Salviana D.S, M.Si. dan Dosen pembimbing (2) Dr. Asep Nurjaman, M.Si.

Sekolah berstandar internasional saat ini banyak diselenggarakan oleh para *stakeholders* pendidikan berdasarkan proses berfikir melalui berbagai interaksi sehingga menghasilkan pergeseran pengetahuan pada aktor (*stakeholders*) terhadap program kelas berstandar internasional yaitu dari program yang dianggap kurang memiliki tujuan yang kurang jelas menjadi program yang menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Stakeholders* dalam pendidikan dihadapkan pada sistem penjaminan mutu dan akreditasi internasional yang menuntut *stakeholders* di dalam sekolah mampu meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menyiapkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan yang memiliki daya saing regional dan global. Penelitian ini sekaligus mencoba untuk mengungkap bahwa program kelas internasional saat ini adalah salah satu program pendidikan yang dibutuhkan masyarakat sebagai suatu *trend* pendidikan untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan *stakeholders* untuk menjadi penyelenggaraan *Internasional Class Program* (ICP) di SMA Laboratorium UM. Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial dan teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer, teori ini memiliki pandangan bahwa kenyataan sosial didasarkan pada definisi subjektif individu dan interpretasinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya beberapa kategorisasi pemaknaan *stakeholders* atas *International Class Program* yang diselenggarakan di SMA Laboratorium UM yaitu terkait dengan prestise, sebagai program yang dianggap memiliki kualitas unggul, program yang dianggap favorit, disamping tiga kategorisasi tersebut meaning terhadap program ICP oleh *stakeholders* juga menimbulkan bias *perseption* yang memerlukan berbagai pembenahan di beberapa segi karena masih terdapat *stakeholders* yang belum merasakan keberbedaan mengambil program ICP atau merasa biasa saja khususnya bagi siswa ICP, ICP adalah suatu program yang masih membuat bingung siswa terkait kebermanfaatan dari sertifikat internasional yang diperoleh. ICP juga program yang saat ini menjadi *trend* dan memiliki daya jual bagi *stakeholders* struktural penyelenggara pendidikan.

**Kata Kunci :** Pemaknaan, *Stakeholders*, ICP

## ABSTRACT

Setiawati, Dewi. 2018. *The Meaningfulness of Stakeholders of International Class Program at SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang*. Tesis, Magister Sociology Courses Muhammadiyah University Of Malang. one is the supervising lecturer Dr. Vina Salviana DS, M.Si. and two supervising lecturer is Dr. Asep Nurjaman, M.Si.

*The current international standard schools many organized by stakeholders of education based on the process of thinking through a variety of interactions resulting in a shift of the knowledge on actors (stakeholders) to class international standard of programs deemed lacking the less obvious purpose being the program that became a need to improve the quality of human resources. Stakeholders in education quality guarantee system is exposed to international accreditation and demanding stakeholders in the school are able to improve educational services in preparing graduates who meet the standards of competence of graduates have regional and global competitiveness. This research while simultaneously trying to reveal that the current international class program is one of the educational program that required community as a trend of education to meet the challenges of globalization.*

*The purpose of this research is to know the definition of the stakeholders to be organizing the International Class Program (ICP) in the HIGH SCHOOL Laboratory UM. This study uses social definition paradigm and theory is the theory of symbolic interaksionisme **Herbert Blumer**, this theory has the view that social reality is based on the subjective definition of the individual and interpretasinya. The type of research used in this research is descriptive research approach while the type of research used is qualitative research.*

*The results showed the occurrence of some such categorization of stakeholders over the International Class Program held at the UM Laboratory HIGH SCHOOL that is associated with prestige, as the program is considered to have superior quality, the program is considered a favorite, along with three such categorization meaning against program ICP by stakeholders also raises the perception bias requires a wide range of improvements in some respects because still there are stakeholders who have not felt keberbedaan take the program ICP or just plain feel especially for the students of ICP, ICP is a program that still make confused students related kebermanfaatan of the international certificate obtained. ICP is also the program that became the trend and have the selling power for stakeholders structural education providers.*

**Keywords:** Definition, Stakeholders, ICP



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Kajian pustaka dan Kerangka Teori .....	4
1. Perspektif Teori Interaksi Simbolik .....	4
2. Sekolah Bertaraf internasional .....	6
3. Tujuan dan penyelenggaraan International Class Program (ICP) .....	6
4. Sekolah berstandar internasional sebagai Dampak Globalisasi Pendidikan .....	7
5. Stakeholders Pendidikan .....	8
6. Kerangka berfikir .....	11
C. Metode penelitian .....	12
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	13
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat SMA laboratorium UM.....	13
2. Mekanisme Kerja International Class Program (ICP) .....	13
3. Data Penerimaan Peserta Didik ICP .....	14
4. Data Peserta Didik ICP .....	14
5. Deskripsi Pekerjaan Orang Tua .....	15
6. Identitas Subjek Penelitian .....	16
B. Pemaknaan Stakeholders Atas International Class Program	
1. Pemaknaan Penyelenggaraan Program ICP Oleh Siswa .....	16
2. Pemaknaan Penyelenggaraan Program ICP Oleh Guru .....	17
3. Pemaknaan Penyelenggaraan Program ICP Oleh Orang Tua Siswa .....	17
4. Pemaknaan Penyelenggaraan Program ICP Oleh Kepala Sekolah .....	18
E. Diskusi Teori .....	19
F. Kesimpulan .....	21
G. Saran-Saran .....	23
H. Daftar Pustaka .....	23
I. Lampiran .....	27

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data Penerimaan Peserta Didik ICP .....	12
2. Tabel 2 Data Peserta Tes IGCSE .....	13
3. Tabel 3 Data Deskripsi pekerjaan Orang Tua .....	14
4. Tabel 4 Data Identitas Subjek Penelitian Stakeholders Guru .....	14
5. Tabel 5 Data Kategorisasi Pemaknaan Stakeholders atas Penyelenggaraan Kelas ICP .....	22



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat pernyataan permohonan penelitian dari Program Pascasarjana jurusan Magister Sosiologi .....	28
Lampiran 2	Surat pernyataan telah melakukan penelitian dari UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPTP2LP).....	29
Lampiran 3	Pedoman wawancara <i>stakeholders</i> guru dan kepala sekolah .....	30
Lampiran 4	Pedoman wawancara <i>stakeholders</i> siswa .....	31
Lampiran 5	Pedoman wawancara <i>stakeholders</i> orang tua .....	32
Lampiran 6	Uji plagiasi orisinalitas tesis .....	33
Lampiran 7	MOU SMA Laboratorium UM dengan <b>Ellyon International School</b> .....	34
Lampiran 8	Permendiknas no 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.....	35
Lampiran 9	Dokumentasi.....	36



## A. Pendahuluan

Arus globalisasi sudah merambah sistem pendidikan sehingga substansi pendidikan nasional saat ini sudah mulai diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan pasar global di tingkat internasional. Indikator kualitas pendidikan juga diarahkan untuk menyesuaikan kondisi global. Bangsa Indonesia sebagai salah satu warga komunitas global, tentu tidak ingin ketinggalan untuk turut merespon arus globalisasi. Pemerintah berupaya mengembangkan Pendidikan dengan melakukan pergeseran visi dari arah lokal ke arah global untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif secara regional dan global.

Perubahan visi pendidikan yang berorientasi internasional sebenarnya sudah sejak lama dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan program-program sekolah atau kelas berstandar internasional. Program sekolah atau kelas berstandar internasional pada awalnya diselenggarakan oleh sekolah-sekolah swasta, dan dilanjutkan dengan program pemerintah dengan menyelenggarakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) pada tahun 2005. Dalam Departemen Pendidikan Nasional, pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, badan penelitian dan pengembangan 2007 dijelaskan bahwa “Sekolah bertaraf internasional adalah sekolah/madrasah yang telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan negara maju yang memiliki keunggulan tertentu, sehingga memiliki daya saing di forum internasional”.<sup>1</sup>

Program sekolah bertaraf internasional di Indonesia secara umum bertujuan meningkatkan kualitas sekolah agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara maksimal dan memiliki daya saing internasional. *Stakeholders* primer dalam pendidikan dihadapkan pada sistem penjaminan mutu dan akreditasi internasional yang menuntut *stakeholders* primer di dalam sekolah agar mampu meningkatkan pelayanan pendidikan dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, badan penelitian dan pengembangan, 2007



menyiapkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan yang memiliki daya saing regional dan global.

*Internasional Class Program* (ICP) adalah salah satu program yang diselenggarakan di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang yang disinyalir mampu meningkatkan *ekspektasi* orang tua untuk memasukkan putra/putrinya ke SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim seleksi penerimaan siswa baru diperoleh data bahwa siswa yang ingin masuk pada kelas internasional adalah siswa-siswa yang memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke berbagai jurusan di perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

Penelitian ini sekaligus mencoba untuk mengungkap bahwa program kelas internasional saat ini adalah salah satu program pendidikan yang dibutuhkan masyarakat sebagai suatu *trend* pendidikan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa tesis dengan judul **“Pemaknaan Stakeholders atas International Class Program (Studi di SMA Laboratorium UM)”** sangat urgen dan signifikan untuk dilakukan. Penelitian ini juga menjadi penting karena siswa, kalangan akademisi dan orang tua adalah para *stakeholders* pendidikan yang benar-benar terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan *Internasional Class Program* (ICP) di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang. Tujuan dari penelitian inii adalah untuk mengetahui pemaknaan *stakeholders* primer atas penyelenggaraan kelas ICP.

## **B. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori**

### **1. Perspektif Teori Interaksi Simbolik**

Istilah interaksi simbolik menurut Blumer, menunjuk sifat khas dari interaksi manusia, yaitu manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan atas tindakan orang lain itu

Itu harus didasarkan atas makna.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Menurut Blumer pokok pikiran interaksi simbolik ada tiga(1)bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu(*thing*)atas dasar makna (*meaning*);(2) makna berasal dari interaksi seseorang dengan sesamanya;(3) makna diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative process*);baca selengkapnya Wirawan (2014:115)

yang terjadi saat ini, sehingga sekolah atau kelas berstandar internasional saat ini bergeser menjadi suatu kebutuhan *stakeholders* pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu. Interaksi antar-individu memiliki makna bukan sekedar merupakan proses respons dari stimulus sebelumnya, melainkan dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau upaya untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Kemampuan interpretasi dalam proses berpikir merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia.

Teori interaksi simbolik secara umum memiliki enam konteks proporsi yang dipakai yaitu: (1) perilaku manusia mempunyai makna dibalik yang menggejala; (2) pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumber pada interaksi manusia; (3) masyarakat merupakan proses yang berkembang holistik, tidak terpisah, tidak linier, tidak terduga; (4) perilaku manusia itu berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologik, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis; (5) konsep mental manusia itu berkembang dialektik; dan (6) perilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif.<sup>3</sup>

Teori interaksi simbolik Blumer yang diidentifikasi oleh Mead dalam schmitt dan schmiit tahun 1966 mencerminkan empat tahapan sebagai satu kesatuan organik (dengan kata lain keempatnya saling berhubungan secara dialektis). Keempat tahap tersebut meliputi tahap-tahap: “Tahap pertama. **Impuls**, yaitu dorongan hati/impuls (*impulse*) yang meliputi “stimuli/rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera” dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu. Tahap kedua adalah **persepsi** (*perception*) yaitu aktor akan menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls dalam hal ini adalah sekolah berstandar internasional. Tahap ketiga adalah **manipulasi** (*manipulation*) yaitu setelah impuls menyatakan dirinya sendiri dan objek yang telah dipahami, langkah selanjutnya objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu.

---

<sup>3</sup> Wirawan, 2014. Ibid hal 114

Tahap keempat adalah konsumsi (*consummation*) atau tahap pelaksanaan melalui pemikiran (dan membaca) mengenai implikasi dari objek (Ritzer, 2004: 275-276).

Program sekolah atau kelas berstandar internasional seiring bertambahnya waktu, telah menjadi *stimuli/rangsangan stakeholder* untuk mengkaji ulang kebutuhan akan pemenuhan peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan kemampuan peserta didik agar mampu bersaing secara regional dan global. *Stakeholder* pendidikan semakin banyak yang bereaksi positif terhadap penyelenggaraan sekolah berstandar internasional, artinya telah terjadi perkembangan persepsi *stakeholder* pendidikan terhadap konsep sekolah berstandar internasional. *Stakeholder* pendidikan telah berhadapan dengan banyak rangsangan atas konsep sekolah berstandar internasional sehingga *stakeholder* memiliki kapasitas untuk memilih yang mana yang perlu diperhatikan dan yang mana perlu diabaikan meski tetap bermunculan sikap pro dan kontra atas penyelenggaraan program tersebut.

## **2. Sekolah Bertaraf internasional**

Sekolah bertaraf internasional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, merupakan “sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional”.<sup>4</sup>

## **3. Tujuan Dan Penyelenggaraan *Internasional Class Program* (ICP)**

Tujuan penyelenggaraan kelas internasional oleh *stakeholders* pendidikan adalah untuk menghadapi persaingan global, yang diharapkan akan menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas dan mampu

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

bersaing secara internasional. Mengacu pada visi pendidikan nasional dan visi departemen pendidikan nasional sampai tahun 2025, visi pendidikan adalah menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Visi tersebut dijabarkan dalam visi sekolah berstandar internasional yang dirancang agar mencirikan wawasan kebangsaan, memberdayakan seluruh potensi kecerdasan dan meningkatkan daya saing global. Contoh visi yang mencerminkan komponen tersebut misalnya “mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila, cerdas dalam hal intelegensi (IQ), emosi (EQ), dan rohani (SQ) agar mampu bersaing secara global<sup>5</sup> (<http://www.kopertis4.or.id>)

Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, baik di level pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi dua dekade paska reformasi hampir seluruh kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari wacana globalisasi dan internasionalisasi pendidikan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan dunia global dengan keikutsertaan Indonesia dengan organisasi-organisasi regional maupun internasional dalam bidang pendidikan, seperti SEAMEO (*South East Asian Ministry of Education Organization*), UNESCO dan PISA (*Program for International Student Assessment*). Bahkan selain itu, Indonesia telah menandatangani kesepakatan terkait GATT (*General Agreement on Trade Tariff*) yang di dalamnya disebutkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari komoditas perdagangan global.<sup>6</sup>

#### **4. Sekolah Berstandar Internasional Sebagai Dampak Globalisasi pendidikan**

Globalisasi dan internasionalisasi yang terjadi dewasa ini seolah membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli ekonomi berkebangsaan Prancis Jacques Attali (1997) di abad ke-21, dimana arus dan tekanan globalisasi dan internasionalisasi begitu kuat. Peran pendidikan dianggap semakin penting sebagai salah satu pilar utama bagi negara-negara dalam memperebutkan supremasi ekonomi dan teknologi. Dalam pandangan

---

<sup>5</sup> Visi kemdikbud 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif diakses pada [guru.pembelajar.indonesia.blogspot.com](http://guru.pembelajar.indonesia.blogspot.com) › INFORMASI PENDIDIKAN

<sup>6</sup> Hayat&Yusuf,2009,*Ibid*,hal :6

Morin, pendidikan masa depan dihadapkan pada masalah universal bahwa proses pembelajaran dan organisasi pembelajaran kita yang terkotak-kotak, sekelumit-sekelumit, dan terpisah-pisah sungguh tidak memadai untuk menangkap realitas dan permasalahan yang semakin mengglobal, transnasional, multidimensional, transversal, multi dan interdisiplin dan berskala planeter. Kehidupan semua orang di era planeter ini, dimanapun berada, menuntut untuk ikut serta dalam suatu kesenasipan dan perjuangan bersama (Ghafur, 2009:2).

Kendati pada tingkat-tingkat tertentu, globalisasi dan internasionalisasi merupakan perpanjangan kepentingan negara-negara industri maju dan sering memarginalkan negara-negara miskin atau sedang membangun. Namun yang sering kurang kita sadari, kata Mochtar Buchori (2001), globalisasi bukanlah suatu proses yang satu arah (*a one-way process*), melainkan suatu proses dua arah (*a two-way process*). Bahkan banyak dimensi-dimensi globalisasi dan internasionalisasi merupakan manifestasi hasil interaksi dari berbagai arah. Globalisasi bukan semata bersifat universal dan homogen namun juga berarti melokalkan hal-hal yang datang dari luar, terutama dalam hal budaya populer. Bisa jadi globalisasi seperti yang dikatakan Neisbitt merupakan hasil interaksi sirkuler antara *think globally and act locally*.

## **5. Stakeholders Pendidikan**

Istilah *Stakeholders* atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu (Brown et al 2001). Pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumberdaya.

*Stakeholders* yang dimaksudkan disini meliputi kepala sekolah, pendidik atau guru, dan peserta didik orang tua peserta didik. *Stakeholders* kebijakan bisa mencakup aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik, para penerima



manfaat, maupun para korban yang dirugikan sebuah kebijakan publik. Dengan demikian, *stakeholders* kebijakan publik bisa mereka yang mendukung ataupun menolak. Dalam garis besar *stakeholders* kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok (putra,2005;dalam Suharto,2007), yaitu:<sup>7</sup>

a) *Stakeholders Kunci:*

Mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan. *Stakeholders* kunci mencakup unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif dan lembaga-lembaga pelaksana program.

b) *Stakeholders Primer:*

Mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek. Mereka biasanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam penyerapan aspirasi publik. *Stakeholders* primer bisa mencakup ;(1) masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak, baik positif maupun negatif;(2) tokoh masyarakat;

(3) pihak manajer publik, yakni lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab dalam penentuan dan penerapan suatu keputusan.

c) *Stakeholders Sekunder:*

Mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan berupaya untuk mempengaruhi keputusan legal pemerintah. *Stakeholders* sekunder meliputi kelompok-kelompok kritis, organisasi profesional (PGRI, IDI, HIPMI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi sosial (Kurniawan, Sukmana, Abdussalam, Masduki;2015:68-69)

Ramirez dalam Buckles,D,1999 juga mengelompokkan *stakeholders* kedalam *stakeholders* primer, *stakeholders* skunder, dan

---

<sup>7</sup> Kurniawan, Sukmana, Abdussalam, Masduki,2015.Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial.Malang:Intrans Publishing

*stakeholders* kunci<sup>8</sup>. Clarkson juga membagi *stakeholders* menjadi dua yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer adalah ‘pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan.’ Contohnya adalah pemegang saham, investor, pekerja, pelanggan, dan pemasok. Menurut Clarkson, suatu perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem *stakeholders* primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. *Stakeholders* sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan<sup>9</sup>.

*Stakeholders* dalam pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Fungsinya berperan sebagai sarana untuk membangun dunia pendidikan. *Stakeholders* pendidikan dibagi dalam tiga kategori utama yaitu :

1. Sekolah termasuk didalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha.
2. Pemerintah diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, Walikota, sampai Menteri Pendidikan Nasional
3. Masyarakat, masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orang tua murid, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik, toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dll.

---

<sup>8</sup> Trisnawati. Partisipasi stakeholder dalam inovasi pendidikan diakses pada *e-kinerja.com/artikel.php?id=368*

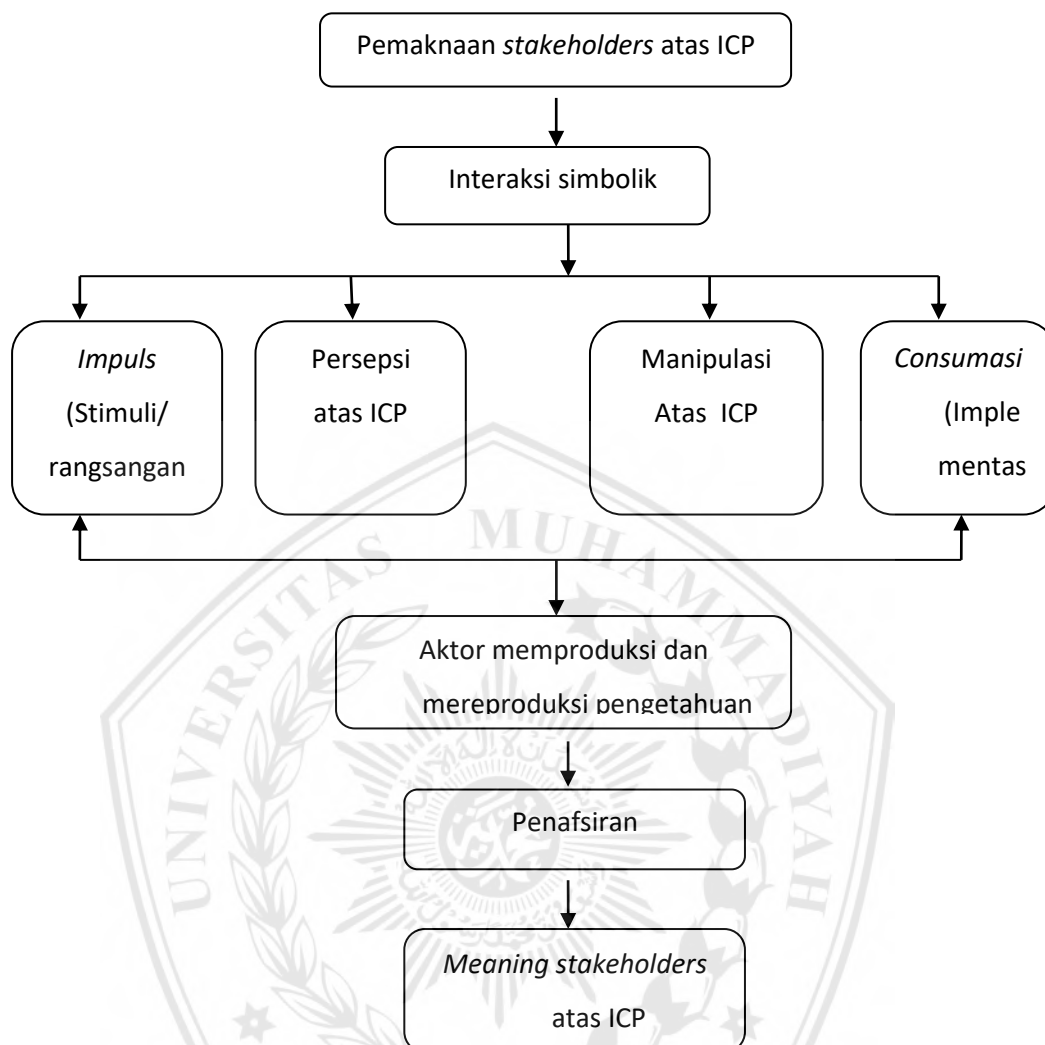
<sup>9</sup> Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Manajemen. diunduh pada <https://pendidikpembebas.wordpress.com/.../analisis-pemangku-kepentingan-stakeholders>

## 6. Kerangka Berfikir

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia salah satu contohnya adalah semakin maraknya sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program kelas internasional yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan internasional yang bekerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD dan negara maju lainnya.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi karena peningkatan sumber daya manusia adalah tugas dan tanggung jawab utama pendidikan yang sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan teknologi. Sekolah berstandar internasional saat ini diselenggarakan oleh para *stakeholders* pendidikan berdasarkan interaksi dari berbagai komunikasi sehingga menghasilkan pergeseran pengetahuan akan kelas berstandar internasional dari program yang dianggap kurang memiliki tujuan yang jelas menjadi program yang menjadi kebutuhan *stakeholders* untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kerangka berfikir peneliti pada penelitian dengan judul pemaknaan *stakeholders* atas penyelenggaraan kelas internasional dijelaskan dalam bagan berikut:

Gambar 1



### C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial karena ingin berusaha mendeskripsikan pemaknaan *stakeholders* atas penyelenggaraan *International Class Program* (ICP) yang selama beberapa waktu memunculkan pro dan kontra. Penelitian ini lebih difokuskan pada pemaknaan *stakeholders* atas *International Class Program* (ICP) studi di SMA Laboratorium UM. Menurut Max Weber, tindakan sosial yang dikembangkan adalah "tindakan penuh arti dari individu", oleh karena fenomena yang hendak dikaji memerlukan penjelasan yang bersifat interpretatif atau makna, dan tujuan yang hendak dicari adalah menafsirkan

dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal (Wirawan,2012:104).

Memperhatikan paradigma diatas maka teori yang sesuai untuk mendeskripsikan pemaknaan sosial *stakeholders* atas penyelenggaraan *International Class Program* (ICP) Studi di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang adalah teori interaksi simbolik, karena teori ini memiliki pandangan bahwa kenyataan sosial didasarkan pada definisi subjektif individu dan interpretasinya (Riyadi,2002:88)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (1987:67) metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional dan akurat. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses peneltain dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang meyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell,1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong,204:4) menjelaskan bahwa metodolgi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **A. Deskripsi lokasi penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang**

SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang merupakan salah satu sekolah Laboratorium yang berada dalam naungan Yayasan Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) Universitas Negeri Malang. SMA Laboratorium UM berlokasi di jalan Bromo No 16 dalam perkembangannya, sejak berdiri hingga sekarang telah mengalami banyak peningkatan baik dari segi sarana dan prasarana maupun prestasi akademik dan non akademik.



SMA Laboratorium memiliki tiga program peminatan, yaitu: Peminatan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), peminatan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan peminatan Bahasa dan Budaya . Mulai tahun 2016 SMA Laboratorium UM bekerjasama dengan Ellyon *International School* untuk menyelenggarakan program *International Class Program* (ICP) dan menyelenggarakan tes Cambridge IGCSE

## 2. Mekanisme kerja *Internasional Class Program* (ICP) di SMA Laboratorium UM

Mekanisme kerja *Internasional Class Program* (ICP) yang diselenggarakan di SMA Laboratorium UM adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Luar Negeri dengan Lembaga Pendidikan Indonesia. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah institusi yang menggunakan kurikulum asing, yang dipadukan dengan kurikulum nasional dalam proses belajar mengajar, serta memperhitungkan akreditasi resmi sekolah.

## 3. Data Penerimaan Peserta Didik ICP (*International Class Program*)

Tabel: 1

Jumlah pendaftar dan yang diterima pada *International Class Program* (ICP) disertai data nilai raport, Nilai Ujian Nasional (NUN), TOEFL

	Tahun	Jumlah Pendaftar reguler	Jumlah pendaftar ICP	Syarat			Jumlah yang diterima
				Nilai raport	Rerata NUN	Nilai Tes	
1	2016	635	20	80.00	22.00	76	267
2	2017	603	21	80.00	24,00	76	290

Sumber data: diolah dari dokumen sekolah

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA Laboratorium UM cukup tinggi. Masyarakat saat ini sudah mulai memperhatikan kualitas dan kuantitas dari sekolah tempat anak-anaknya belajar.

**4. Data peserta didik *International Class Program (ICP)* yang mengikuti ujian IGCSE Periode juni 2018 SMA Laboratorium UM**

Tabel 2  
Data peserta tes IGCSE *June* 2018 SMA Laboratorium UM

No	Nama siswa	Tanggal lahir	Jenis kelamin	Bidang studi		Dokumen	
				0511 (extended) Matematika	0580 (extended) Bhs.Ingggris	Fc. Akta lahir	Fc Pa por
1	Ariqo Afaf	1 Maret 2001	P		√	√	
2	Ananda ayundia	3 Juni 2001	P	√		√	
3	Charis arik	24 april 2001	P		√	√	
5	Happ Maharani	5 November 2001	P		√	√	
6	Intan Priskilla	2 Maret 2001	P	√			√
7	Jennifer Floryan	12 Mei 2002	P		√	√	
8	M.Iqbal	19 November 2001	L	√	√	√	
9	M.Alif	7 Maret 2002	L	√	√	√	
10	M.Ricko	18 april 2001	L		√	√	
11	Nadiyah Pharahita	20 Maret 2001	P		√	√	
12	Popy Olivia	17 November 2000	P	√		√	
14	Rosdannisa	17 Desember 2000	P	√	√	√	
15	Shofwan	9 Oktober 2001	L		√	√	
16	Tiara	9 Juni 2001	P		√	√	

No	Nama siswa	Tanggal lahir	Jenis kelamin	Bidang studi		Dokumen	
				0511 (extended) Matematika	0580 (extended) Bhs.Ingggris	Fc. Akta lahir	Fc Pa por
19	Pinta Danisa	26 Juli 2001	P	√	√	√	
20	Shafa Az Zahra P	19 Oktober 2001	P	√	√	√	
21	Zahra putri Tidar	27 Maret 2001	P			√	

Sumber data : diolah dari dokumen kurikulum sekolah

## 5. Deskripsi keadaan pekerjaan orang tua

Tabel: 3

Keadaan pekerjaan orang tua siswa *International Class Program (ICP)*

kelas X,XI

	Pekerjaan	Jumlah
1	Swasta	13
2	PNS	6
3	BUMN	2
4	Wiraswasta	11
5	Dosen	3
6	Konsultan	1
7	Dokter	2
8	Polisi/TNI	3

Sumber data: diolah dari dokumen BK

## 6. Identitas subjek penelitian *stakeholders* (guru)

Tabel: 4

Identitas subjek penelitian *stakeholders* (guru)

No	Nama	Bidang Studi	Keterangan
1	Evi Fatmawati, M.Pd	Biologi	Pengembang SMA Lab UM
2	Sri hariyati, M.Pd	Bhs.Ingggris	Tim Pengembang SMA Lab UM
3	M.Teguh,S.Pd	Sejarah	Tim Pengembang SMA Lab UM

No	Nama	Bidang Studi	Keterangan
4	Drs.Sunarjo	Bhs.Inggris	Penanggung Jawab ICP
5	Deddy Setiawan,M.Pd	Matematika	Waka. Kurikulum
6	Budi Utami,M.Pd	Bhs.Inggris	Staff kurikulum
7	Fasril Vaudhi,S.Pd	Kimia	Guru Kimia dan Wali kelas ICP

Sumber data: diolah dari dokumen sekolah

## B. Pemaknaan *stakeholders* atas *International Class Program (ICP)*

### 1. Pemaknaan Penyelenggaraan Program *International Class Program (ICP)* oleh Siswa

Pemaknaan mengambil program kelas internasional bagi *stakeholders* pada kalangan siswa adalah suatu kebanggaan dan rasa senang karena *International Class Program* merupakan simbol pendidikan yang memiliki prestise lebih tinggi dimasyarakat dan merupakan simbol pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh beberapa subjek penelitian, salah satunya adalah Tira yang ungkapannya disetujui oleh subjek penelitian Ananda:

“Ya senang bu rasanya bisa mengambil program yang selangkah lebih maju dari yang lainnya, biar ndak biasa-biasa saja seperti yang lainnya. Saya ingin beda dari yang lain.ingin tau rasanya sekolah dengan program internasional itu bagaimana sih..., Iya betul ungkap Ananda saya juga seperti itu bu ...ingin beda, selangkah lebih maju”

Pemaknaan *Stakeholders* di kalangan siswa ICP tidak hanya karena *prestise* tetapi juga menunjukkan keinginan siswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam meningkatkan kemampuan menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara aktif adalah tujuan paling dominan dari peserta didik yang memilih program ICP. Hal ini dikemukakan hampir seluruh siswa yang mengambil program ICP di SMA Lab UM dan juga meningkatkan kemampuan menganalisa soal-soal berstandar internasional. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Subjek penelitian siswa ICP kelas X.

Subjek penelitian Maulana dan Dikky menuturkan:

“Saya mengambil program ICP pertama saya ingin belajar dan lancar berbahasa Inggris sehingga saya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Dan saya juga mengambil program ICP karena saya ingin *go internasional* tetapi... saya juga ndak berani *berekspektasi* terlalu tinggi katanya, yaa kan kita juga harus rasional kita sudah mampu bersaing belum dengan siswa asing ungkapnya”

Pemaknaan yang agak berbeda juga disampaikan oleh beberapa subjek penelitian bahwa perasaan yang mereka rasakan ketika mengambil program ICP adalah suatu hal yang biasa saja karena mereka beranggapan belum merasakan keberbedaan yang mencolok antara mengambil program reguler dengan ICP dan masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang program internasional yang diselenggarakan di SMA Laboratorium UM. Hal ini seperti yang disampaikan subjek penelitian Chaca kepada peneliti:

“ya biasa saja bu rasanya kayak masuk jurusan IPA, gurunya juga belum semua pakai bahasa Inggris, tetangga saya juga belum banyak yang ndak tau program internasional itu apa, jadi saya kalau ditanya ngambil program apa ..ya program IPA..males jelasinnnya..., tapi kalau sesama siswa SMA Lab sendiri ya bangga ada prestise tersendiri “

Siswa kelas XI program ICP beberapa sudah bisa memahami bahwa proses belajar di Indonesia dengan proses belajar internasional berdasarkan silabus cambridge IGCSE yang selama ini digunakan mengajar oleh guru-guru ICP dalam mengajar mereka berbeda. Perbedaan itu nampak dari proses belajar dan soal-soal yang mereka hadapi lebih berbasis *skill* yaitu menekankan kemampuan menganalisa soal dari pada kemampuan menghafalkan soal. Hal ini diungkapkan oleh subjek penelitian sebagai berikut:

Subjek penelitian Shafa menuturkan sebagai berikut:

“Soal-soal pada tes cambridge itu sederhana tapi dalam, sedangkan soal pada ujian nasional itu mbulet buu..., panjang tapi rumit dan tidak jelas ungkapnya”

Pemaknaan memilih program ICP ( *International Class Program*) dari kalangan siswa menunjukkan bahwa internasionalisasi pendidikan telah



memberikan keuntungan berupa kesadaran akan pentingnya meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang yaitu era globalisasi.

Disisi lain juga terdapat pemaknaan siswa terhadap program ICP yang masih mengalami kebingungan atas kebermanfaatan dari program yang telah dipilih untuk kelanjutan pendidikan yang akan mereka tempuh. Beberapa siswa yang mengambil program ICP masih belum memahami fungsi dari sertifikat internasional yang mereka miliki nanti, hal ini seperti yang dinyatakan subjek penelitian Shofwan pada peneliti:

“saya tidak tau apa fungsi dari sertifikat cambridge itu, sebab saya pernah dengar penjelasan salah satu dosen dari Universitas Negeri Malang yang merupakan salah satu dokter pembelajaran disini bu...mengatakan kalau sertifikat Cambridge IGCSE itu tidak bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi ... bagaimana itu, bingung bu”.

Ketidakjelasan atau kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan keuntungan mengambil program ICP oleh Stakeholders dari kalangan siswa menunjukkan diperlukan sosialisasi lebih lanjut tentang fungsi dan manfaat mengambil program kelas internasional sehingga program kelas internasional akan berjalan secara efektif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu stakeholders dari kalangan siswa, orang tua, dan sekolah sehingga akan memperoleh output atau lulusan sesuai yang diharapkan. Knight (2003) dalam laporan surveinya kepada *International Association of University* (IAU) dalam Abdul Syukur (2010:15) menjelaskan bahwa internasionalisasi pendidikan memiliki dampak positif berupa keuntungan dan dampak negatif berupa resiko yang harus ditanggung. Keuntungan yang dihasilkan meliputi bidang pengembangan siswa, staff dan guru, pengajaran dan pembelajaran, penelitian, kemampuan bersaing, jaringan, kesadaran budaya, standar dan kualitas. Sedangkan resiko yang harus ditanggung mencakup *brain drain*, identitas budaya, biaya yang mahal, dan unsur budaya.

## **2. Pemaknaan Penyelenggaraan Program *International Class Program* (ICP) oleh guru.**

Penyelenggaraan program ICP atau *International Class Program* di SMA Lab UM pada awalnya menimbulkan ketegangan dan kebingungan bagi guru-guru karena merasa belum siap untuk mengajar kelas berstandar internasional. Penjelasan dan berbagai sosialisasi yang diberikan oleh manajemen sekolah membuat bapak ibu guru bisa memahami pentingnya diselenggarakan kelas berstandar internasional.

Penyelenggaraan *International Class Program* pada awalnya memaksa guru-guru untuk mempersiapkan diri agar segera membuat persiapan dengan cara mempersiapkan silabus IGCSE, membuat rancangan mengajar berstandar cambridge IGCSE, menyiapkan sumber belajar, belajar berbahasa Inggris aktif, berkonsultasi dengan dosen-dosen pendamping dari Universitas Negeri Malang sesuai dengan bidang studi masing-masing. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh guru-guru yang juga difasilitasi oleh manajemen sekolah antara lain pelatihan-pelatihan mengajar di kelas berstandar internasional. Subjek penelitian Ibu Evi Fatmawati dan Budi Utami menuturkan:

“Kami pernah mengikuti pelatihan pemetaan materi dari Jubille School Jakarta, dari Universitas Negeri Malang”, placement tes dan kursus dari Lembaga bantuan belajar bahasa Inggris di Malang”

Pemaknaan *International Class Program* bagi guru-guru adalah program yang berdasarkan pada standar internasional yaitu standar yang sudah digunakan oleh negara-negara maju, khususnya standar yang digunakan sekolah adalah Cambridge IGCSE.

Kepada peneliti subjek penelitian Bapak Fasri Vaudhi menuturkan:

“Program ICP adalah sekolah rintisan yang berusaha dibentuk oleh *stakeholders* struktural sekolah untuk menyikapi globalisasi, ICP juga suatu program yang diselenggarakan untuk mencetak peserta didik sesuai dengan visi dan misi sekolah yaitu mencetak generasi siap menghadapi globalisasi”

Pemaknaan penyelenggaraan *International Class Program* (ICP) bagi *stakeholders* dari kalangan guru adalah suatu program yang penting untuk diselenggarakan walaupun untuk menyelenggarakan program kelas internasional bukanlah hal yang mudah, diperlukan banyak usaha dan perjuangan. Berbagai hambatanpun dihadapi oleh guru-guru SMA Lab UM dalam penyelenggaraan program ICP. Ini antara lain kendala bahwa tidak semua guru mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif dalam proses belajar mengajar, situasi sosial di sekolah yang belum tercipta suasana internasional sehingga seringkali siswa yang berasal dari sekolah internasional sekalipun akan mengalami penurunan kebiasaan dalam menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Sehingga pembiasaan perlu sekali dilakukan untuk menciptakan kesuksesan penyelenggaraan program ICP.

### **3. Pemaknaan Penyelenggaraan Program *International Class Program* (ICP) oleh Orang Tua Siswa.**

Pemaknaan *stakeholders* dari orang tua ICP SMA Lab UM sebagian besar menyatakan memasukkan anak-anaknya ke kelas ICP karena kebanggaan dan *prestise*. Sekolah berstandar internasional diharapkan akan menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan status sosial anak dan orang tua, sehingga mereka akan mampu menghadapi tantangan globalisasi yang semakin tahun semakin kompetitif, sebagaimana disampaikan subjek penelitian Yudi Wibisono kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya memilih menyekolahkan anak saya di kelas internasional Harapannya, nanti sewaktu menginjak dewasa, anak-anak sudah siap dihadapkan dengan tantangan global yang jelas pasti akan semakin sulit dan ketat persaingannya disamping itu saya juga bangga anak saya bisa masuk kelas internasional harapannya yaa

agar bisa lancar berbahasa Inggris dan bisa meningkatkan status sosial keluarga lebih tinggi dari status orang tuanya gitu”

#### **4. Pemaknaan Penyelenggaraan Program *International Class Program* (ICP) oleh Kepala Sekolah.**

Pemaknaan penyelenggaraan program kelas internasional di SMA Lab UM oleh Kepala SMA Lab UM adalah suatu program yang penting untuk diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional maupun internasional. Hal tersebut diungkapkan subjek penelitian Ibu Rosdiana Amini kepada peneliti:

“penyelenggaraan program ICP adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing internasional, disamping itu program ICP diselenggarakan sebagai salah satu program unggulan SMA Lab UM. Untuk mewujudkan itu tentu saja pihak manajemen sekolah agar berupaya dengan keras demi suksesnya program ini. makanya guru-guru harus mendukung program ini dengan mengikuti berbagai pelatihan, dan kursus yang akan difasilitasi oleh sekolah”

Penyelenggaraan program ICP juga dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi persaingan dengan sekolah-sekolah yang swasta atau negeri dalam memberikan pelayanan terbaik agar bisa menghasilkan lulusan yang kompetitif, sebagaimana dituturkan oleh Ibu Rosdiana Amini kepada peneliti:

“ Yaa program ICP ini salah satunya di buka karena tuntutan manajemen pengembang sekolah Lab UM, karena semua sekolah Lab UM harus mampu memenuhi tuntutan daya saing yang berkualitas. SMA Lab UM harus membuka program ini karena di SD Lab UM dan SMP Lab UM sudah membuka program kelas internasional lebih dulu”. SMA Lab masih juga merintis tetapi sudah ada beberapa sekolah yang ingin bekerjasama dengan kita untuk menyelenggarakan program internasional ini, ini menunjukkan program kelas internasional sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Tambah beliau dengan ekspresi yang tegas dan optimis memaparkan betapapun mungkin sulit dan berat, tetapi suka atau tidak suka hal ini semakin menjadi tuntutan dan *tren* yang tidak terelakkan saat ini dan kedepannya”

## E. Diskusi Teori

Pemaknaan *stakeholders* atas penyelenggaraan *International Class Program* adalah suatu kajian penelitian yang menunjukkan pergeseran pemikiran *stakeholders* primer yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa bahkan orang tua siswa terhadap program kelas internasional. Pada tahun 2006 saat pemerintah menyelenggarakan program Rintisan Sekolah Berstandar Internasioanal (RSBI) banyak *stakeholders* pendidikan yang berusaha menolak program internasionalisasi pendidikan tersebut karena berbagai sebab diantaranya adalah masalah diskriminasi, masalah kesenjangan, masalah ketidakadilan dalam pendidikan, dll.

*Meaning* oleh *stakeholder* primer yang di dalam penelitian ini *stakeholder* primer yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa, terbentuk melalui proses interaksi yang telah berkembang secara *holistik* antara kondisi ekonomi, sosial bahkan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan pemikiran dan perilaku yang lebih *konstruktif* reaktif atas penyelenggaraan *international class program*.

Makna dan interpretasi dari internasionalisasi dalam dunia pendidikan artinya terus mengalami perubahan karena perbedaan latar belakang arah kegiatan, kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Makna dan Interpretasi internasional berkembang berdasarkan, (1) definisi-definisi terkait dengan kategori atau tipe-tipe kegiatan yaitu pendekatan kegiatan, (2) terkait dengan pengembangan *skill*, sikap, staff dan lembaga, yaitu pendekatan kompetensi, (3) internasionalisasi juga dapat fokus pada tujuan-tujuan seperti pengembangan etos atau budaya di sekolah yang memakai atau mendukung perspektif dan inisiatif interkultural dan internasional, yaitu pendekatan etos, dan yang ke, (4) internasionalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses yang mengintegrasikan perspektif atau dimensi internasional ke dalam fungsi utama sebuah lembaga yaitu pendekatan proses.<sup>10</sup>

Makna (*meaning*) bukan hal yang bersifat statis melainkan dinamis dan cenderung berubah-ubah, karena melibatkan pengalaman subjektif atau

---

<sup>10</sup> Syukur Abdul, 2010 Ibid hal 28

perilaku tersembunyi yaitu interpretasi. <sup>11</sup> *Stakeholders* pendidikan telah mengalami perubahan penafsiran secara dinamis akan pemaknaannya terhadap sekolah-sekolah berstandar internasional sehingga mempengaruhi *stakeholders* dalam melakukan tindakan untuk memilih dan menyelenggarakan sekolah dengan program berstandar internasional. Lebih lanjut Blumer menyampaikan gagasannya bahwa arti penting makna pada tindakan sosial, sumber-sumber makna dan peran makna dalam penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perubahan makna pada sekolah berstandar internasional yaitu dari sekolah berstandar internasional sebagai sekolah yang kurang memiliki kejelasan tujuan menjadi sekolah yang diperlukan untuk menuju pembelajaran yang memenuhi kebutuhan daya saing regional dan internasional.

Tabel 5  
Kategorisasi Pemaknaan *Stakeholders* atas ICP

No	Kategorisasi	Pemaknaan <i>stakeholders</i>
1	<i>Prestise</i>	a. Program yang memberi rasa bangga dan <i>prestise</i> tinggi bagi orang tua siswa dan siswa ICP
		b. Program yang dianggap selangkah lebih maju dari program reguler oleh siswa ICP
		c. Program yang dianggap memiliki nilai sosial yang tinggi karena ICP dianggap sebagai simbolnya pendidikan berkualitas
2	Kualitas unggul	a. Program yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing cukup baik.
		b. Program yang diselenggarakan untuk meningkatkan <i>skill</i> siswa dalam menggunakan bahasa Inggris secara aktif.
		c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan analisis soal dengan menggunakan <i>kritikal thinking</i> pada soal-soal berstandar internasional.
		d. Program yang dibentuk oleh <i>stakeholders</i> struktural sekolah untuk menyikapi globalisasi karena ICP suatu program yang diselenggarakan untuk mencetak peserta

		didik sesuai visi dan misi sekolah yaitu mencetak generasi siap menghadapi globalisasi dengan menggunakan kurikulum standar internasional.
		e. Program ICP diselenggarakan sebagai sekolah unggulan
		f. Program yang diselenggarakan agar sekolah memiliki ciri khas yaitu sebagai sekolah yang memiliki program internasional
		g. Program SPK (satuan pendidikan kerjasama) dalam sekolah berstandar internasional adalah program yang “layak jual”.
3	Favorit	Program yang dianggap favorit karena menggunakan kurikulum berstandar internasional dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris.
4	<i>Confius perception</i>	Beberapa dari siswa ICP merasa biasa saja dan bingung tentang kebermanfaatan dari memilih program ICP dan fungsi dari sertifikat internasional yang diperoleh karena proses pembelajaran di kelas ICP dan reguler selama ini masih cenderung sama

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

### **Pemaknaan *Stakeholders* Atas *International Class Program* di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang**

Penyelenggaraan kelas berstandar internasional atau *International Class Program* (ICP) di SMA Lab UM merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas. *International Class Program* yang diselenggarakan di SMA Lab UM adalah sekolah nasional yang berstandar internasional.

Kurikulum program ICP yang diselenggarakan di SMA Lab UM adalah perpaduan antara kurikulum nasional yaitu K13 dan kurikulum Cambridge IGCSE dengan pola mengadaptasi dan mengadopsi. Proses pembelajaran pada program ICP di SMA Lab UM melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di negara anggota OECD (*Organization For Economic Cooperation And Development*) dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual serta dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu. Sedangkan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan sejarah, dan muatan lokal menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Penyelenggaraan *International Class Program* (ICP) di SMA Lab UM dimaknai oleh *stakeholders* pendidikan dari kalangan siswa sebagai sebuah langkah lebih maju dari siswa lainnya, sebagai suatu pilihan program yang diharapkan mampu mengantarkan mereka menguasai bahasa Internasional yaitu bahasa Inggris dengan baik dan aktif, mampu memiliki *skill* dalam menganalisa soal-soal berbasis analisa berstandar internasional, memiliki *prestise* sebagai simbol nilai sosial untuk meningkatkan status sosial sebagai sarana untuk melakukan mobilitas sosial yang harus diperjuangkan dengan meningkatkan motivasi belajar.

*Stakeholders* primer dari kalangan orang tua siswa memaknai sekolah berstandar internasional saat ini menjadi *trend* orang tua dalam memilih sekolah dikarenakan mereka meyakini sekolah yang berstandar internasional merupakan sekolah terbaik dan kelak akan mampu bersaing di dunia global. *International Class Program* dipilih orang tua karena memiliki *prestise* dan kebanggaan tersendiri untuk memproduksi dan mereproduksi status sosial.

*Stakeholders* dari kalangan guru-guru dan kepala sekolah di SMA Lab UM memaknai penyelenggaraan *International Class Program* (ICP) adalah suatu program yang penting untuk diselenggarakan untuk meningkatkan standar mutu dan kualitas dari suatu layanan pendidikan, walaupun untuk menyelenggarakan program kelas internasional bukanlah hal yang mudah, diperlukan banyak usaha dan perjuangan. Berbagai hambatanpun dihadapi oleh guru-guru SMA Lab UM dalam penyelenggaraan program ICP Ini antara lain kendala bahwa tidak semua guru mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif dalam proses belajar mengajar dan situasi sosial yang belum kondusif untuk melaksanakan program ICP.

#### **G. Saran-saran**



1. Sekolah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan standar internasional yang berbasis *skill*, meningkatkan sarana dan prasarana, serta media belajar yang bisa digunakan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan siswa pada guru sehingga dapat menumbuhkan sikap kompetitif dan mandiri.
2. Sekolah perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga dari luar negeri secara langsung agar para siswa memiliki wawasan tentang teknis belajar di luar negeri dan cara mendapatkan beasiswa.
3. Pembuat kebijakan dalam menyelenggarakan kelas ICP sebaiknya mengkaji lebih dalam lagi tentang tujuan penyelenggaraan program tersebut dan mensosialisasikan dengan transparan tujuannya sehingga program ini akan berjalan lebih efektif.
4. Khusus untuk siswa program ICP perlu diberikan pengarahannya lebih jelas lagi sehingga akan tercipta *stimuli* atau rangsangan yang lebih terarah lagi terhadap manfaat dari memilih program ICP.
5. Mengembangkan budaya positif secara berkelanjutan untuk pengembangan peningkatan standar kualitas siswa dan guru.

#### H. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi.1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ali, Mudlofir,2012.*Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*.Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Creswell, J.W.2015.*Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional: Dirjen Dikdasmen* 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah, Madrasah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Badan Pengembangan Dan Penelitian*, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2007 Pusat Informasi Dan Humas Depdiknas*, 2007
- Hamalik, O.1990.*Pengembangan Kurikulum: Dasar-Dasar Dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju
- Hendyat, Soetopo dan Wasty, Soemanto.1986. *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayat Bahrul &Yusuf Suhendra.2011.*Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*.Jakarta: Bumi aksara.
- Kurniawan, Sukmana, Abdussalam,Masduki. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing

- Paul, Hirst dan Grahame thomson. *Globalization In Question*. Terjemahan P. Sumitro *Globalisasi adalah mitos*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia
- Nurkolis, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sukmadinata, Syaodih Nana. *Pengembangan Kurikulum, Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subandijah. 1992. *Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sutardjo. *Makna Sosial Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Bagi Stakeholder (Kasus Sma Negeri 2 Jombang)*. 2013. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang
- Syukur, Abdul. 2010. *Internasionalisasi Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh. diakses 9 september 2017.  
[repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../ABDUL%20SYUKUR-SPS.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../ABDUL%20SYUKUR-SPS.pdf)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprpto, Riyadi. 2002. *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*. Malang, Avveroes Press Kerjasama Dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Anatomi Dan Perkembangan Teori Sosial*. Malang: Aditya media
- Teguh, T dan Sobari, Yusuf A. 2012. *Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers
- Uppe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi, Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirawan, I.B. 2014. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group

#### **Jurnal**

- Anwar, Ahmad. 2015. *Islam dan Globalisasi pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Volume 3 nomor 1 februari 2015. Diunduh pada 3 januari 2018
- Widyastono, Henry. 2010. *Pengembangan Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional*. Jurnal pendidikan dan kebudayaan, Volume 16, Nomor 3 mei 2010. Diunduh pada 18 april 2018.
- Surya Dharma. 2007. Strategi pengembangan sekolah bertaraf internasional (SBI) Jurnal tenaga kependidikan Vol 1 No 1 April 2007

#### **Website**

- Anjaya Capri.2015. Unpacking The SPK Matters SMA “Kalau tak kenal maka tak sayang...” [diunduh pada 7 februari 2017 pada www.nevendpro.com/wp/wp-content/uploads/.../2015-Oktober-Unpacking-SPK.pdf](http://www.nevendpro.com/wp/wp-content/uploads/.../2015-Oktober-Unpacking-SPK.pdf)
- Agnas setiawan,2015.kelebihan metode belajar cambridge diakses pada <https://geograph88.blogspot.com>.info basa basi pendidikan diunduh pada 3 maret 2018.
- Afid, Burhanudin,2009. *Persepsi Warga Sekolah Tentang Manajemen Sekolah Bertaraf Internasional Di Sma Negeri Kota Yogyakarta*. Tesis program pascasarjana universitas negeri yogyakarta diunduh pada maret 2018
- Rochman,Noor rochman.2013.Semangat- Pendidikan-Pembebasan Pasca Putusan Penghapusan RSBI. diunduh Maret 2017 pada situs [goodcitizen.blogspot.com/2013/.../pendidikan-pembebasan-pasca-putusan](http://goodcitizen.blogspot.com/2013/.../pendidikan-pembebasan-pasca-putusan)
- Teori Pemangku Kepentingan diakses pada Wikipedia Pustaka Rakyat pada situs [https://id.wikipedia.org/wiki/pemangku kepentingan](https://id.wikipedia.org/wiki/pemangku_kepentingan) diunduh pada 1 juni 2018-07-06
- Visi Departemen Pendidikan Nasional 2025. Diunduh pada 4 April 2018 pada <http://www.Kopertis4.or.id>  
[http://itha.wordpress.com/2007/09/12/globalisasi dan kebudayaan. Cambridge international examination](http://itha.wordpress.com/2007/09/12/globalisasi-dan-kebudayaan-Cambridge-international-examination). Diunduh pada 3 januari 2018  
<https://direktorisekolahkristenkatolikjawa.wordpress.com/jawa.../elyon-christian-schoo...>*Elyon Christian School*. Diunduh pada 2 februari 2018.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

Kampus : GKB 4 Lantai 1 - 3 Jl. Raya Tlogomas No, 246 Malang  
Telp. +62-341-464318, 464319 ext. 318, 319 email : pascaumm@gmail.com

: E.7.d/0647/PPs-UMM/IV/2018

Malang, 23 April 2018

: -

: *Permohonan Ijin Penelitian*

Yth : Kepala Sekolah SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang  
Jl. Bromo No. 16 Malang

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ini memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : DEWI SETIAWATI  
NIM : 201610270211008  
Program Studi : MAGISTER SOSIOLOGI  
Judul : PEMAKNAAN STAKEHOLDERS ATAS  
INTERNATIONAL CLASS PROGRAM (STUDI DI SMA  
LAB UM)

Demikian, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Akhsanul In'am, Ph.D



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
UPT PUSAT PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN (P2LP)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312 Psw. 499 Faksimile: 0341-573 611  
Laman: www.um.ac.id \* Email: p2lp.um@gmail.com

Nomor : 6.4.7/UN32.20/LT/2018  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

6 April 2018

Yth. Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor E.7.d/0649/PPs-UMM/TV/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian, yaitu:

nama : Dewi Setiawati  
NIM : 201610270211008  
prodi : Magister Sosiologi

dengan ini kami sampaikan bahwa UPT P2LP UM tidak keberatan dengan permohonan tersebut untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul "**Pemaknaan Stakeholders Atas International Class Program (Studi di SMA Lab. UM)**" di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan pada bulan April s.d. Mei 2018.

Hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, mohon dikoordinasikan dengan Kepala SMA Laboratorium UM.

Setelah menyelesaikan kegiatan penelitian, yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan abstrak dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada UPT P2LP UM.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Kepala SMA Laboratorium UM
2. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
UPT PUSAT PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN(P2LP)  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341- 551312 Psw. 499 Faksimile: 0341-573 611  
Laman: www.um.ac.id \* Email: p2lp.um@gmail.com

SURAT KETERANGAN  
Nomor 23.5.3/UN32.20/LT/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Drs. Sucipto, M.S.

jabatan : Kepala

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Dewi Setiawati

NIM : 201610270211008

prodi : Magister Sosiologi

instansi : Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

benar-benar telah melakukan Penelitian Tesis yang berjudul "Pemaknaan *Stakeholders* Atas *International Class Program* (Studi di SMA Lab. UM)" yang dilaksanakan di SMA Laboratorium UM pada tanggal April s.d. Mei 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

23 Mei 2018

Kepala,



Sucipto, M.S.

NIP 196103251986011001

**Instrumen Wawancara Bagi Stakeholders**  
**(Siswa)**

Pemaknaan *Stakeholders* atas *International Class Program* (ICP)

1. Identitas Subjek Penelitian
  - a. Nama :
  - b. Kelas :
  - c. Jenis kelamin :
  - d. Alamat :
  - e. No HP :
2. Apa yang anda ketahui tentang program kelas internasional yang sedang anda tempuh saat ini?
3. Apa motivasi anda untuk mengambil program international class di SMA Lab UM ini?
4. Bagaimana persiapan anda untuk bisa masuk dalam kelas internasional yang diselenggarakan oleh SMA Lab UM ini?
5. Bagaimana perasaan anda ketika dinyatakan diterima di program kelas internasional yang ada di SMA Lab UM?
6. Bagaimana perasaan anda ketika orang-orang di sekitar anda melihat bahwa anda sedang sekolah di SMA dengan program kelas internasional?
7. Fasilitas belajar apa saja yang anda siapkan agar mampu mengikuti target pembelajaran pada program kelas internasional?
8. Bagaimana perasaan anda ketika anda harus menghadapi ujian internasional IGCSE yang sistematis dan standarnya berbeda dengan ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah dan berbeda dengan standar ujian nasional?
9. Bagaimanakah perasaan anda ketika anda berhasil mendapatkan sertifikat internasional ?
10. Apakah makna sertifikat internasional itu bagi anda ?
11. Apakah yang anda ketahui tentang pendidikan standar internasional?
12. Apakah proses belajar dalam *International Class Program* yang diselenggarakan oleh SMA Lab UM ini telah sesuai dengan harapan anda?
13. Apakah anda akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
14. Apakah anda akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri?
15. Apakah anda mengetahui bahwa program kelas internasional yang anda tempuh ini harus mengeluarkan biaya mahal?apa tanggapan anda?
16. Apakah cita-cita anda?



## **Instrumen Wawancara Bagi Stakeholders (Orang tua siswa)**

Pemaknaan *Stakeholders* atas *International Class Program* (ICP)

1. Identitas subjek penelitian (orang tua siswa ICP)
  - a. Nama
  - b. Pekerjaan
  - c. Jenis kelamin
  - d. Usia
  - e. Alamat
  - f. No Hp
2. Apa yang menjadi tujuan utama dalam mengambil program international class di SMA Lab UM ini untuk putra/putri anda?
3. Bagaimana persiapan anda untuk bisa memasukkan putra/putri anda masuk dalam kelas internasional yang diselenggarakan oleh SMA Lab UM ini?
4. Apakah anda mengikuti putra/putri anda pada program bimbingan atau kursus bahasa Inggris?
5. Bagaimana perasaan anda ketika putra/putri anda dinyatakan diterima di program kelas internasional yang ada di SMA Lab UM?
6. Bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar anda melihat putra/putri anda masuk dalam program kelas internasional di SMA Lab UM? (Status sosial naik, prestise, dll)
7. Fasilitas belajar apa saja yang anda siapkan agar putra/putri anda mampu mengikuti target pembelajaran pada program kelas internasional?
8. Bagaimana perasaan anda ketika putra/putri anda harus menghadapi ujian internasional IGCSE yang sistematis dan standarnya berbeda dengan ujian yang diselenggarakan di sekolah dan berbeda dengan standar ujian nasional?
9. Bagaimanakah perasaan anda ketika putra/putri anda berhasil mendapatkan sertifikat internasional ?
10. Apakah yang anda ketahui tentang pendidikan standar internasional?
11. Apakah anda akan berencana menyekolahkan putra/putri anda pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi?
12. Apakah anda akan menyekolahkan putra/putri anda pada perguruan tinggi di luar negeri?
13. Apakah anda mengetahui bahwa program kelas internasional yang anda tempuh ini harus mengeluarkan biaya mahal? apa tanggapan anda?



### **Instrumen Wawancara Bagi Stakeholders (Kepala Sekolah dan Guru)**

Pemaknaan *Stakeholders* atas *International Class Program* (ICP)

1. Identitas Subjek penelitian (Guru)
  - a. Nama
  - b. Mata pelajaran yang diampu
  - c. Jenis kelamin
  - d. Usia
  - e. Alamat
2. Apa yang anda ketahui tentang *international class program* (ICP) yang diselenggarakan oleh SMA Lab UM?
3. Menurut anda apakah tujuan sekolah menyelenggarakan program kelas internasional di SMA Lab UM ini?
4. Apakah anda mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan standar internasional
5. Apakah anda setuju bahwa program kelas internasional dapat meningkatkan SDM yang mampu berdaya saing regional dan internasional? Alasannya?
6. Bagaimana persiapan anda untuk mengajar pada *International Class Program* (ICP) di SMA Lab ini?
7. Apakah anda mengetahui tentang standar-standar mengajar pada kelas internasional?
8. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan mengajar untuk kelas program internasional?
9. Siapakah penyelenggara pelatihan tersebut?
10. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui bahwa siswa-siswa program international class harus mengikuti ujian dengan standar internasional?
11. Persiapan apa saja yang anda lakukan agar siswa-siswa pada kelas ICP dapat lulus dalam tes internasional tersebut?
12. Apakah anda mengikuti bimbingan atau kursus bahasa inggris agar dapat mengajar dengan baik pada kelas ICP?
13. Apakah anda pernah mengikuti tes TOEFL, atau sejenisnya?
14. Apakah menurut anda dengan mengikuti program kelas internasional bisa meningkatkan status sosial siswa dan orang tua siswa tersebut?



## ELYON CHRISTIAN SCHOOL

崇高基督教学校

TODDLER | PLAYGROUP | KINDERGARTEN | PRIMARY | JUNIOR HIGH | SENIOR HIGH

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya 33A Surabaya - 60187 | Telp: (031) 732 5999 | Fax: (031) 734 5454  
Jl. Sulohejo Prima Utara blok PY no 6, Surabaya - 60113 | Telp: (031) 597 1414  
Jl. Kartajaya Indah Timur VII-141 Surabaya - 60116 | Telp: (031) 5984894 Fax: (031) 5954555  
Website: www.elyon.sch.id | email: info@elyon.sch.id

### Memorandum of Understanding

between

#### First Party

ELYON CHRISTIAN HIGH SCHOOL

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya no. 33 A, Surabaya 60187  
(031) 7325999

and

#### Second Party

SEKOLAH MENENGAH ATAS LABORATORIUM

Jl. Bromo 16, Malang 65112

(0341) 368639

This Memorandum of Understanding (MOU) sets for the terms and understanding between first party and second party in regards to the implementation of International General Certificate for Secondary Education (IGCSE).

#### Background

As second party is considering Cambridge curriculum pathway to be implemented formally, therefore second party is planning to join IGCSE for the first time to be further evaluated.

#### Purpose

This MOU will help both parties to understand the terms and understanding on how to conduct examinations independently.



## ELYON CHRISTIAN SCHOOL

崇高基督教学校

TODDLER | PLAYGROUP | KINDERGARTEN | PRIMARY | JUNIOR HIGH | SENIOR HIGH  
Jl. Raya Sukomanunggal Jaya 33A, Surabaya - 60187 | Telp. (031) 732 5999 | Fax: (031) 734 5464  
Jl. Sutonejo Prima Utara blok PY no 8, Surabaya - 60113 | Telp. (031) 591 1414  
Jl. Kertajaya Indah Timur VII / 41, Surabaya - 60118 | Telp. (031) 5984904 Fax: (031) 5964995  
Website: [www.elyon.sch.id](http://www.elyon.sch.id) | email: [info@elyon.sch.id](mailto:info@elyon.sch.id)

### Contact Information

#### First Party

Tang Chu Kean

Elyon Christian High School

Principal

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya no. 33A, Surabaya 60187

(031) 732 5999

[keithtang@elyon.sch.id](mailto:keithtang@elyon.sch.id)

#### Second Party

Rosdiana Amini

Sekolah Menengah Atas Laboratorium

Principal

Jl. Bromo 16, Malang 65112

(0341) 368639

[smalabum@yahoo.com](mailto:smalabum@yahoo.com)



Date: 30 October 2017

(Tang Chu Kean, Elyon Christian High School, Principal)



Date: 30 October 2017

(Rosdiana Amini, SMA Laboratorium, Principal)

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN  
NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA  
  
NOMOR  
78TAHUN 2009  
  
TENTANG  
  
PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF  
INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN  
NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan, dan mengembangkan daya imajinasi, inovasi, nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah bertaraf internasional, perlu memberikan arah mutu sekolah bertaraf internasional;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004) Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4437);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementrian  
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan  
Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia,  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Peraturan Presiden Nomor  
20 Tahun 2008;  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008)  
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Nomor 4754);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang  
Kedudukan,
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M 2004 mengenai  
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan  
Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan    PERATURAN            MENTERI                    NASIONAL  
                          TENTANG            PENYELENGGARAAN       SEKOLAH  
                          BERTARAF            INTERNASIONAL            JENJANG  
                          PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
5. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. *Organisation for Economic Co-Operation and Development* yang selanjutnya disingkat OECD adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.
8. Sekolah bertaraf internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
9. Negara maju lainnya adalah negara yang tidak termasuk dalam keanggotaan *OECD* tetapi memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan tertentu.
10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
11. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional

## Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki :

- a. kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- b. daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional;
- c. kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya;
- d. kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan;
- e. kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris (skor *TOEFL Test* > 7,5) dalam skala *internet based test* bagi SMA, skor *TOEIC* 450 bagi SMK), dan/atau bahasa asing lainnya;



- f. kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup;
- g. kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara professional.

## BAB II

### STANDAR PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan setelah memenuhi seluruh 8 (delapan) unsur SNP yang diperkaya dengan standar pendidikan negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Kurikulum

##### Pasal 4

- (1) Kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP, SMA, dan SMK.

Bagian Ketiga  
Proses Pembelajaran

Pasal 5

- (1) SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual.
- (3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu.
- (4) Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
- (5) Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari kelas IV untuk SD.

Bagian Keempat  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Pendidik SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran/bidang studi tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal.
- (4) SD bertaraf internasional memiliki paling sedikit 10% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (5) SMP bertaraf internasional memiliki paling sedikit 20% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya sudah terakreditasi.
- (6) SMA dan SMK bertaraf internasional memiliki paling sedikit 30% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (7) Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional.
- (8) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki skor TOEFL  $\geq 7,5$  atau yang setara atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan sebagai bahasa pengantar pembelajaran pada SBI yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) SBI dapat memperkerjakan pendidik warga negara asing apabila tidak ada pendidik warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mengampu mata pelajaran/bidang studi tertentu.

- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari keseluruhan pendidik.
- (3) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan SBI sekurang-kurangnya meliputi kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan SBI memenuhi standar tenaga kependidikan yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) wajib :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau dari perguruan tinggi negara lain yang diakui setara S2 di Indonesia;
- c. telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah;
- d. mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya secara aktif;
- e. memiliki skor *TOEFL*  $\geq 7,5$  atau bahasa asing lainnya secara aktif;
- f. memiliki jiwa kewirausahaan;
- g. kemampuan di bidang manajemen, organisasi, dan kepemimpinan pendidikan serta kewirausahaan;
- h. mampu membangun jejaring internasional;
- i. kemampuan mengoperasikan komputer/teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan

- j. kemampuan mengembangkan rencana pengembangan sekolah (RPS)/rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

## Bagian Kelima

### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 10

- (1) SBI memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Setiap ruang kelas SBI dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.
- (3) SBI memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia (*e-library*).
- (4) SBI memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru.
- (5) SBI melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya di bidang akademik dan non-akademik.

## Bagian Keenam

### Pengelolaan

#### Pasal 11

Pengelolaan SBI harus :

- a. memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;

- b. menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir;
- c. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di negara maju;
- d. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; dan
- e. menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

## Pasal 12

- (1) Pengelolaan SBI pada SD, SMP, SMA, dan SMK dapat diselenggarakan secara :
  - a. satu sistem-satu atap
  - b. satu sistem tidak-satu atap
  - c. beda sistem tidak-satu atap
- (2) Model terpadu-satu sistem-satu atap dilaksanakan dalam satu atap dilaksanakan dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.
- (3) Model terpisah-satu sistem-tidak satu atap dilaksanakan dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.
- (4) Model terpisah-beda sistem-tidak satu atap dilaksanakan di lokasi yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan model SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

## Bagian Ketujuh

### Pembiayaan

#### Pasal 13

- (1) Biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI.
- (3) SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.
- (4) Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat
- (5) Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat.
- (6) Pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat.
- (7) Masyarakat dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

- (8) Bantuan pada SBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah.
- (9) Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan SBI berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan memperoleh hasil audit akuntan publik dengan predikat wajar tanpa pengecualian.

#### Bagian Kedelapan

#### Penilaian

#### Pasal 15

- (1) SBI menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan sistem penilaian pendidikan sekolah unggul di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan model penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peserta didik SBI wajib mengikuti ujian nasional.



- (4) SBI melaksanakan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) SBI dapat melaksanakan ujian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (6) SBI dapat memfasilitasi peserta didiknya untuk mengakses sertifikasi yang diakui secara internasional dan/atau mengikuti ujian akhir sekolah yang sederajat dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

### BAB III PESERTA DIDIK

#### Pasal 16

- (1) Penerimaan siswa baru SBI pada sekolah dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. SD
    - 1. Akte kelahiran;
    - 2. Tes kecerdasan di atas rata-rata Tes Intelegensi Kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
    - 3. Tes minat dan bakat;
    - 4. Surat keterangan sehat dari dokter;
    - 5. Kesiediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
  - b. SMP
    - 1. Nilai rata-rata rapor SD Kelas IV sampai Kelas VI minimal 7,5;
    - 2. Nilai rata-rata ijazah SD minimal 7,5;
    - 3. Tes kecerdasan di atas rata-rata Tes Intelegensi Kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
    - 4. Tes minat dan bakat;
    - 5. Surat keterangan sehat dari dokter; dan

6. Kesiediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
- c. SMA/SMK
1. Nilai rata-rata rapor SMP Kelas VII sampai Kelas IX minimal 7,5;
  2. Nilai rata-rata ijazah SMP minimal 7,5;
  3. Tes kecerdasan di atas rata-rata Tes Intelegensi Kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
  4. Tes minat dan bakat;
  5. Tes bahasa Inggris;
  6. Tes kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  7. Surat keterangan sehat dari dokter; dan
  8. Kesiediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
- (2) SBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan peserta didik dimaksudkan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, baik potensi akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur, dan pengembangan diri.

## Pasal 18

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh SBI memperoleh ijazah.
- (2) Peserta didik SMK yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh SBI diberi ijazah dan sertifikat kompetensi internasional sesuai kompetensi keahlian internasional yang dicapai.
- (3) Peserta didik yang mengikuti dan lulus sertifikasi dari lembaga yang diakui secara internasional berhak memperoleh sertifikat yang diakui secara internasional.

## BAB IV KULTUR SEKOLAH

### Pasal 19

- (1) SBI mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan, dan berbudaya akhlak mulia.
- (2) Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah.
- (3) SBI mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.
- (4) SBI membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan di bidang bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan budaya lintas bangsa.

## Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan SBI dilaksanakan dengan menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar atau pendidikan menengah; dan
  - b. memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan
- (3) Kerja sama akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. penyelenggaraan program sekolah kembaran (*sister school*);
  - b. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
  - c. penyelenggaraan program transfer kredit;
  - d. pertukaran peserta didik;
  - e. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
  - f. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
  - g. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
  - h. pemagangan khusus pendidikan menengah kejuruan;
  - i. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
  - j. penyelenggaraan program penelitian; dan/atau k. penyelenggaraan seminar bersama
- (4) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibatalkan, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengendali terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KEWENANGAN PENYELENGGARAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) SBI.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan SBI.
- (5) Penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan 1 (satu) SD untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi apabila pemerintah kabupaten/kota tidak menyelenggarakan SD bertaraf internasional.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah provinsi memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendanaan investasi;
  - b. pendanaan biaya operasional;
  - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. penjaminan mutu.

### Pasal 24

- (1) Pemerintah provinsi menerima satuan pendidikan yang diserahkan oleh kabupaten/kota atau mendirikan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi SBI.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat di setiap kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

- (4) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

#### Pasal 25

Pemerintah dapat mendirikan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten/kota merencanakan kebutuhan mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah merencanakan kebutuhan mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

- (4) Mutasi kepala sekolah pegawai negeri sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI harus mendapat izin dari Menteri.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menugaskan pendidik Pegawai Negeri Sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan masyarakat.

## BAB VI

### PERIZINAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 27

Izin penyelenggaraan SBI dapat diberikan oleh Menteri kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai hasil studi kelayakan untuk menjadi SBI;
- b. memperoleh nilai akreditasi A dari BAN-S/M;
- c. berbadan hukum pendidikan;
- d. memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan salah satu sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- e. telah bekerja sama dengan salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan internasional;
- f. memiliki rencana pengembangan SBI;
- g. memperoleh rekomendasi pemerintah daerah;
- h. memiliki sumber pendanaan dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan penyelenggara sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- i. penyelenggara SBI menjamin kecukupan pendanaan selama 6 (enam) tahun kedepan.



## Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan SBI dari Menteri, badan hukum pendidikan satuan pendidikan atau badan hukum pendidikan penyelenggara mengajukan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf i.

- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima usul rencana penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Departemen melakukan verifikasi kelayakan penyelenggaraan SBI.
- (4) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi, Menteri memberikan izin atau menolak memberikan izin penyelenggaraan SBI.
- (5) Verifikasi oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan Tim Pengendali yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Izin penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk satu sekolah



## BAB VII PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 29

- (1) Pengendalian penyelenggaraan SBI dimaksudkan untuk ketercapaian tujuan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi:
  - a. verifikasi dalam rangka perizinan;
  - b. supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SBI.
- (3) Menteri dapat membentuk Tim Pengendali untuk membantu pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2).

### PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional mencakup pengawasan akademik dan non-akademik.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI.
- (3) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.

B X  
BAB IX

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 31

- (1) SBI wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Menteri dapat meminta laporan SBI sesuai dengan kebutuhan.

SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pelarangan menerima peserta didik baru, dan  
atau
  - c. pencabutan izin penyelenggaraan SBI.
- (2) Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari tim pengendali.
- (3) Pencabutan izin penyelenggaraan SBI dilakukan apabila
  - a. SBI sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional;
  - b. SBI sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau manajemen satuan pendidikan bertaraf internasional; dan
  - c. SBI memperkerjakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan asing yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur.

### Pasal 33

SBI yang izin penyelenggaraannya dicabut menjadi satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah sesuai kewenangannya.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

(1) Satuan pendidikan yang menyatakan sebagai SBI wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) tidak boleh menggunakan nomenklatur SBI.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 16 Oktober 2009  
MENTERI PENDIDIKA NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro  
Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan  
Nasional,







Kegiatan Global Learning 2017 Siswa SMA Laboratorium UM ke Jepang



Kegiatan global Learning Siswa SMA Lab UM di Korea Tahun 2016



Salah satu subjek penelitian atas nama Dikky kelas X ICP



Kegiatan Belajar biologi bersama Ibu Evi Fatmawati sekaligus salah satu Tim Pengembang SMA Laboratorium UM





## RIWAYAT HIDUP



Dewi Setiawati, lahir pada tanggal 19 agustus 1980 di Kediri. Lahir dari pasangan Bapak Achmad Rifai dan Ibu Nur Jannah. Menempuh pendidikan TK sampai dengan SMA di kabupaten Malang. Pendidikan SD sampai dengan SMA ditempuh di yayasan Almaarif satu Singosari Malang, Pendidikan Sarjana ditempuh di Universitas Negeri Malang pada jurusan

Pendidikan Sejarah dengan Skripsi yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap meningkatnya Motivasi belajar siswa Sejarah di SMA N 2 malang dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2003 mengajar di SMP PGRI 2 Singosari, tahun 2005 sampai sekarang mengajar di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan dengan mengambil jurusan Magister Sosiologi